



**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD) DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA
2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.....	12
2.1 Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan.....	12
2.2 Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (nilainya sama).....	12
2.3 Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.....	13
2.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan	13
2.5 Implikasi atas realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target terhadap target capaian program dan kegiatan.....	14
2.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.....	14
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	25
3.1 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.....	25
3.2 Penjelasan/alasan mengenai perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan.....	25
3.3 Menyajikan tabel Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2024.....	26

BAB IV PENUTUP..... 37

4.1 Catatan Penting..... 37

4.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan..... 37

4.3 Rencana Tindak Lanjut..... 38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laporan Evaluasi Triwulan RKPD	17
Tabel 3.1	Perubahan Tahun 2024.....	27
Tabel 3.2	Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	29

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 mengacu pada perencanaan Nasional dan Provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program - program pembangunan baik dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perubahan RKPD yang diikuti dengan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Beberapa kondisi yang mendasari dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2024 yaitu adanya perkembangan kerangka keuangan daerah terutama pada pendapatan asli daerah, adanya saldo anggaran lebih, serta hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan II yang berimplikasi pada penyesuaian rencana program/kegiatan. Perubahan RKPD Tahun 2024 meliputi perubahan:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses penyusunan dokumen perubahan RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 meliputi:

- (1) penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- (2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- (3) penetapan perubahan RKPD. Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan – Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Propinsi Jawa TENGAH Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 16 Tahun 2029 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009- 2029 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031; (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 11 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan RKPD DPMPTSP Kabupaten Jepara Tahun 2024 adalah untuk melakukan penyesuaian perkembangan kerangka keuangan daerah, serta rencana program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi triwulan II. Sedangkan tujuannya adalah untuk :

1. Memberikan landasan operasional bagi DPMPTSP Kabupaten Jepara dalam menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;
2. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2024.
3. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
4. Pedoman penyusunan perubahan RKA Tahun 2024

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, proses rancangan perubahan, perumusan rancangan akhir perubahan dan penetapan perubahan RKPD Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II : Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab ini menguraikan tentang capaian program/kegiatan yang tidak memenuhi target, memenuhi target, melebihi target, juga faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, serta implikasi atas realisasi program/kegiatan dan kebijakan/tindakan yang diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

2.1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Bagian ini menguraikan tentang program/kegiatan yang tidak memenuhi terget kinerja yang direncanakan

2.2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (nilainya sama)

Bagian ini menguraikan tentang program/kegiatan yang telah memenuhi target yang direncanakan

2.3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Bagian ini menguraikan tentang program/kegiatan yang melebihi target yang direncanakan

2.4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Bagian ini menguraikan tentang penyebab tidak tercapainya atau tercapainya target kinerja

2.5. Implikasi atas realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target terhadap target capaian program dan kegiatan

Bagian ini menguraikan tentang implikasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target

2.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

Bagian ini menguraikan tentang perencanaan yang diambil untuk mengatasi penyebab tidak tercapainya target

Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang garis besar rekapitulasi program dan kegiatan sebelum dan sesudah perubahan dan tabel sesuai di aplikasi SIPD

3.1. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bagian ini menguraikan tentang garis besar rekapitulasi program dan kegiatan : jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kebutuhan dana yang dirinci menurut sumber pendanaannya sebelum dan sesudah perubahan tahun 2024

3.2. Penjelasan/alasan mengenai perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan

Bagian ini menguraikan tentang penjelasan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan

3.3. Menyajikan tabel Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan PD

Bagian ini menguraikan tentang tabel rumusan rencana perubahan program kegiatan tahun 2024 sebagaimana yang diinput di aplikasi SIPD tahun 2024

BAB IV : Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan Renja, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara telah melaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024 dengan mengampu program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II sebagaimana berikut :

- 2.1 Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja adalah :

1. Pemeliharaan Mebel

- 2.2 Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (nilainya sama)

Adapun kegiatan yang sudah memenuhi target kinerja adalah :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

11. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
19. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
20. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

2.3 Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun kegiatan yang sudah melebihi target kinerja adalah:

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
3. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
4. Pengawasan Penanaman Modal
5. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

2.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

- a. Faktor penyebab tidak terpenuhi target kinerja adalah : Kondisi meubelair yang masih baik
- b. Faktor terpenuhinya target kinerja adalah : Sesuai dengan target kebutuhan rutin kantor
- c. Faktor melebihi target kinerja adalah :

- Sesuai dengan perencanaan awal, kegiatan banyak dilaksanakan di triwulan I dan II
- Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas perizinan dalam pengajuan izin yang diharapkan terjadi peningkatan jumlah perizinan setiap tahun;
- Adanya motivasi masyarakat untuk mengurus sendiri perizinan dimaksud dan tidak melalui makelar/calor;
- Adanya dukungan anggaran lewat DAK, sehingga bisa dipergunakan untuk binwasdal ke perusahaan/pelaku usaha di Kabupaten Jepara
- Pengajuan izin bisa dilaksanakan dari rumah karena bisa melalui on line

2.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD

- Implikasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan :
Keadaan mebelair masih baik
- Implikasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan :
 - Semua target kinerja di DPMPTS bisa terpenuhi sesuai rencana
 - Semua kegiatan DPMPTS dapat diterima oleh masyarakat yang berkaitan dengan layanan perizinan
- Implikasi program/keg yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yg direncanakan :
 - Warga masyarakat banyak yang terfasilitasi perizinannya
 - Masyarakat banyak yang sudah memiliki legalitas izin
 - Masyarakat sudah banyak yang melakukan laporan LKPM
 - Program sosialisasi layanan perizinan dapat diterima oleh masyarakat

5.6 Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

- Mempertahankan bahkan meningkatkan jaringan sistem dari pusat
- Mempertahankan bahkan meningkatkan sosialisasi perizinan kepada masyarakat
- Mempertahankan bahkan meningkatkan pendampingan bagi pelaku usaha

Tabel 2.1
Laporan RKPD Tahun 2024
Kabupaten Jepara Triwulan I s/d II

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerinta han Daerah danProg ram/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target RPD pada Tahun 2023 s/d 2026(Akhir Periode RPD/ Renstra)		Realisasi Capaian RPD s/d RKPD Tahun (2023)		Target Kinerja & Anggaran RKPD Tah un Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD/RENS TRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaa n RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD/ RENSTRA s/d Tahun 2024 (%)		OPD Pena nggu ng jawab	K e t
			I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	%	K	Rp	K	Rp	17	18
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																									
2.18 .01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPA TEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	90,5 %	23.2 89.7 87.0 00			89,5%, 4.22 9.34 7.50 0		759.09 0.929		1.08 3.96 1.33 9						1.84 3.05 2.26 8		43,21 %							DP MP TS P
218 001 2.01	1) Perenc anaan, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a) Jumlah dokumen perencanaan, peng anggaran dan evaluasi kinerja PDyang tersusun	28 Dok ume n	147. 000. 000			7 Doku men 18.0 00.0 00	6 Dok ume n	0		3.94 5.00 0					6 Dokumen	3.94 5.00 0	85, 71 %	21,92 %							DP MP TS P
218 001 2.	1.1) Peny usunan Dokumen	a) Jumlah Dokumen Perencanaan	12 Dok ume n	66.0 00.0 00			3 doku men 11.0 00.0 00	2 Dok ume n	0		1.86 4.00 0					2 Dokumen	1.86 4.00 0	66, 67 %	16,95 %							DP MP TS P

[illegible]

05	Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi kepegawaian PD yang tersusun	ume n	3.000				ume n															TS P
2180012.05009	3.1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Tugas dan Fungsi	a) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	440 Orang	2.343.613.000		29 Orang	54.300.000	1 Dokumen	23.748.000	-	775.500				1 Dokumen	24.523.500	50%	45,16%					DP MP TS P
2180012.06	4) Administrasi Umum Perangkat Daerah	a) Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun	16 dokumen	1.497.370.000		4 dokumen	252.869.000	1 Dokumen	228.631.638	1 Dokumen	49.890.469				2 Dokumen	278.522.107	50%	110,14%					DP MP TS P
2180012.06002	4.1) Penyediaan Peralatan dan Perle ngkapan Kantor	a) Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	350.000.000		1 paket	32.000.000	0,25 Paket	0	0,25 Paket	7.908.000				0,5 Paket	7.908.000	50%	24,71%					DP MP TS P
2180012.06003	4.2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	a) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 pake t	66.000.000		1 paket	5.000.000	0,25 Paket	6.640.000	0,25 Paket	0				0,5 Paket	6.640.000	50%	132,80%					DP MP TS P
2180012.06005	4.3) Penyediaan Barang Cetakan dan Peng gandaan	a) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Pake t	190.000.000		1 paket	20.000.000	0,25 Paket	1.352.500	0,25 Paket	3.027.500				0,5 Paket	4.380.000	50%	21,90%					DP MP TS P
2180012.06009	4.4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Lapo ran	891.370.000		12 Lapo ran	195.869.000	3 lapo ran	0	3 lapo ran	32.300.000				6 Laporan	32.300.000	50%	89,72%					DP MP TS P

218 001 2. 07	5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a) Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4 paket	3.37 2.76 9.00 0			1 Paket	36.0 00.0 00	-	0	1 Paket	32.3 00.0 00					1 Paket	32.3 00.0 00	10 0%	89,72 %					DP MP TS P
218 001 2. 070 06	5.1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	a) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3.37 2.76 9.00 0			2 Unit	36.0 00.0 00	-	0	1 Paket	32.3 00.0 00					1 Paket	32.3 00.0 00	10 0%	89,72 %					DP MP TS P
218 001 2. 08	6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a) Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun	48 Laporan	972. 000. 000			12 laporan	657. 900. 000	3 Laporan	82,258. 203	3 Laporan	143. 460. 597					6 Laporan	225. 718. 800	50 %	34,31 %					DP MP TS P
218 001 2. 080 02	6.1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	a) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	106. 000. 000			12 Laporan	2.40 0.00 0	3 Laporan	42.453	3 Laporan	134. 747					6 Laporan	177. 200	50 %	7,38%					DP MP TS P
218 001 2. 080 03	6.2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perleengkapan Kantor	a) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perleengkapan Kantor yang Disediakan	48 laporan	126. 000. 000			12 Laporan	15.0 00.0 00	3 Laporan	1.730.0 00	3 Laporan	1.72 0.00 0					6 Laporan	3.45 0.00 0	50 %	23%					DP MP TS P
218 001 2. 080 04	6.3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 laporan	740. 000. 000			12 Laporan	640. 500. 000	3 Laporan	80.485. 750	3 Laporan	141. 605. 850					6 Laporan	222. 091. 600	50 %	34,67 %					DP MP TS P

		n													-	34.9	-	31,74					DP MP TS P
218 001 2. 09	7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	a) Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang pemerintahan Daerah yang dipelihara	328 Unit	625.000.000			60 unit	110.050.000	-	14.427.950	-	20.507.308				-	34.935.258	-	31,74%				
218 001 2. 090 01	7.1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	a) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	76 Unit	295.000.000			19 Unit	56.550.000	-	3.367.950	-	14.441.308				-	17.809.258	-	31,49%				DP MP TS P
218 001 2. 090 02	7.2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	76 Unit	66.000.000			19 Unit	8.000.000	-	0	-	2.726.000				-	2.726.000	-	34.08%				DP MP TS P
218 001 2. 090 05	7.3) Pemeliharaan Mebel	a) Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	43.000.000			20 Unit	7.500.000	-	-	-	-				-	-	-	-				DP MP TS P
218 001 2.	7.4) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	a) Jumlah Sarana dan Prasarana	4 Unit	86.000.000			1 Unit	15.000.000	-	3.690.000	-	-					3.690.000		24,60%				DP MP

09010	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi																					TS P
2180012.09011	7.5) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	a) Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	92 Unit	135.000.000		23 Unit	23.000.000		7.370.000		3.340.000					10.710.000		46,60%					DP MP TS P
218002	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi	53 %	180.000.000		51%	35.000.000	25%	581.180	-	24.750.000				25%	25.331.180	25 %	72.37%					DP MP TS P
2180022.02	2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	a) Jumlah dokumen investasi yang tersusun	4 Dokumen	180.000.000		1 Dokumen	35.000.000	-	581.180	1 Dokumen	24.750.000				1 Dokumen	25.331.180	50 %	72.37%					DP MP TS P
2180022.02002	2.1) Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	a) Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	180.000.000		1 Dokumen	35.000.000	-	581.180	1 Dokumen	24.750.000				1 Dokumen	25.331.180	50 %	72.37%					DP MP TS P
218003	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan promosi penanaman modal	5.5 %	969.204.000		4.5 %	55.000.000	2,5 %	185.900	-	51.047.008				2,5%	51.232.908	2,5 %	93,15%					DP MP TS P
2180032.01	1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman	a) Jumlah Jenis Promosi Penanaman	11 Dokumen	969.204.000		3 dokumen	55.000.000	-	185.900	1 Dokumen	51.047.008				1 Dokumen	51.232.908	34 %	93,15%					DP MP TS P

[illegible]

	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																							
2180042.01003	1.2) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	a) Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	40 Orang	43.000.000			5 Pelaku Usaha	6.000.000	5 Pelaku Usaha	143.000	1 Pelaku Usaha	0					6 Pelaku Usaha	143.000	120%	2.38%					DP MP TSP
218005	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase kepatuhan pelaku usaha dalam laporan LKPM	90%	2.099.562.000			80%	694.199.000	50,74%	4.000.000	-	184.788.891					50,74%	188.788.891	63,4%	27,20%					DP MP TSP
218005.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha yang dilakukan binwasdal					583 kegiatan usaha	694.199.000	-	4.000.000	425 kegiatan usaha	184.788.891					425 Kegiatan Usaha	188.788.891	72,9%	27,20%					
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam					13 Kegiatan Usaha	95.354.000	0	0	0	0					0	0	0	0					DP MP TSP

[illegible]

218 006 2. 010 01	1.1) Pengolahan , Penyajian dan Pema nfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan secara Elektronik	a) Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5.80 0 Dok ume n	1.34 6.00 0.00 0			1.400 Doku men	40.0 00.0 00	544 Dok ume n	39.850. 000	2.33 3 Dok ume n	0					2.877 Dokumen	39.8 50.0 00	20 5,5 %	99,63 %						DP MP TS P
-------------------------------	--	---	------------------------------	---------------------------	--	--	----------------------	--------------------	------------------------	----------------	------------------------------	---	--	--	--	--	------------------	--------------------	----------------	------------	--	--	--	--	--	---------------------

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan :
jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kebutuhan dana yang dirinci menurut sumber pendanaannya sebelum dan sesudah perubahan Tahun 2024

Total Kebutuhan dana/pagu indikatif Perubahan Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024 terdiri dari :

PROGRAM :

- 1. 6 program, 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan yang didanai oleh APBD Kabupaten Jepara dan DAK adalah sebagai tabel berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Tahun 2024

No	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	TAMBAH/KURANG
1	PAGU	Rp. 5.136.299.000	Rp. 5.136.299.000	-
2	PROGRAM	6	6	-
3	KEGIATAN	13	13	-
4	SUB KEGIATAN	28	28	-

3.2 Penjelasan/alasan Mengenai Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan tabel di atas alokasi anggaran tetap sama dengan alokasi yang ada dalam Perubahan Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024, tetapi ada beberapa perubahan sebagai berikut :

1. Penggeseran rekening untuk gaji P3K yang semula belum teranggarkan
2. RAK yang tidak mendesak semula di triwulan I dan II di alihkan ke Triwulan IV
3. Penyesuaian anggaran.

3.3 Menyajikan Tabel Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 sebagaimana yang telah diinput pada aplikasi SIPD Tahapan Penetapan – Input Penetapan RKPD Perubahan Tahun 2024

Rumusan rencana perubahan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, lokasi dan kebutuhan pagu indikatif yang dibutuhkan dapat dilihat dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel 3.2
PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DPMPTSP KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD RENSTR OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPA IAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHA N 2024				NASI ONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							4.742.146 .000,00	5.136.299. 000,00	5.136.299. 000,00	394.153.000,00						5.671.000 .000,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.742.146 .000,00	5.136.299. 000,00	5.136.299. 000,00	394.153.000,00							5.671.000 .000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							4.742.146 .000,00	5.136.299. 000,00	5.136.299. 000,00	394.153.000,00							5.671.000 .000,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran				89.5 %	89.5 %	4.089.326 .000,00	4.265.180. 000,00	4.265.180. 000,00	688.674.000,00							4.778.000 .000,00	
	2.18.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun				7 dokumen	7 dokumen	18.000.00 0,00	18.000.000 .00	18.000.000. 00	0,00				5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)			21.000.00 0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Jepara, Jepara, Panggan g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)			12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Jepara, Jepara, Panggan g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)			2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan			3 Laporan	3 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Jepara, Jepara, Panggan g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)			7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang tersusun			3 dokumen	3 dokumen	2.960.207.000,00	3.136.061.000,00	3.136.061.000,00	175.854.000,00			-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)			3.626.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.837.207.000,00	3.100.421.000,00	3.100.421.000,00	263.214.000,00	Kab. Jepara, Jepara, Panggan g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)			3.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	123.000.00,00	35.640.000,00	35.640.000,00	-87.360.000,00	Kab. Jepara, Jepara, Panggan g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)			126.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD yang tersusun				3 dokumen	3 dokumen	54.300.000,00	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00			-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)			56.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				29 Orang	29 Orang	54.300.000,00	54.300.000,00	54.300.000,00	0,00	Kab. Jepara, Jepara, Panggan g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)			56.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum PD yang tersusun				4 dokumen	4 dokumen	252.869.000,00	252.869.000,00	252.869.000,00	0,00			-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)			258.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	Kab. Jepara, Jepara, Panggan g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)			33.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Jepara, Jepara, Panggan g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Jepara, Jepara, Panggan g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		21.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	195.869.000,00	195.869.000,00	195.869.000,00	0,00	Kab. Jepara, Jepara, Panggan g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		198.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			1 paket	1 paket	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00			5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		38.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	Kab. Jepara, Jepara, Panggan g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		38.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun				12 laporan	12 laporan	657.900.000,00	657.900.000,00	657.900.000,00	0,00				5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		664.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Kab. Jepara, Panggangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		3.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Jepara, Panggangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		16.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	640.500.000,00	640.500.000,00	640.500.000,00	0,00	Kab. Jepara, Panggangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		645.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dipelihara				60 Unit	60 Unit	110.050.000,00	110.050.000,00	110.050.000,00	0,00			-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		115.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			19 Unit	19 Unit	56.550.000,00	56.550.000,00	56.550.000,00	0,00	Kab. Jepara, Jepara, Panggan g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		58.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			19 Unit	19 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Jepara, Jepara, Panggan g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		9.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																
		Jumlah Mebel yang Dipelihara			20 Unit	20 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Jepara, Jepara, Panggan g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		8.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Jepara, Jepara, Panggan g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		16.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			23 Unit	23 Unit	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	Kab. Jepara, Jepara, Panggan g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		24.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi			51 %	51 %	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	2.000.000,00						37.000.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi			25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen investasi yang tersusun			1 dokumen	1 dokumen	25.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00			-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		26.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		26.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan promosi penanaman modal			4.5 %	4.5 %	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	2.000.000,00						57.000.000,00	

2.18.03.2.01	Penyelenggara Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Promosi Penanaman Modal				3 Dokumen	3 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00				5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		57.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																	
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kab. Jepara, Panggang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		57.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Izin			76 %	76 %	46.920.000,00	46.920.000,00	46.920.000,00	2.080.000,00						49.000.000,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan Jumlah Izin dan Non izin yang diterbitkan				1400 dokumen	1400 dokumen	46.920.000,00	46.920.000,00	46.920.000,00	0,00			-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		49.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																	
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1300 Pelaku Usaha	1300 Pelaku Usaha	40.920.000,00	40.920.000,00	40.920.000,00	0,00	Kab. Jepara, Panggang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		42.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																	

			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Jepara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase kepatuhan pelaku usaha dalam laporan LKPM			80 %	80 %	475.900.000,00	694.199.000,00	694.199.000,00	232.100.000,00						708.000.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan binwasdal			160 Pelaku Usaha	160 Pelaku Usaha	475.900.000,00	694.199.000,00	694.199.000,00	218.299.000,00			-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		708.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya																
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya			9 Kegiatan Usaha	13 Kegiatan Usaha	12.205.000,00	95.354.000,00	95.354.000,00	83.149.000,00	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		98.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			313 Pelaku Usaha	435 Pelaku Usaha	337.695.000,00	362.136.000,00	362.136.000,00	24.441.000,00	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)		370.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																			
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha				85 Kegiatan Usaha	135 Kegiatan Usaha	126.000.000,00	236.709.000,00	236.709.000,00	110.709.000,00	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)			240.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase izin dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi				70 %	70 %	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	2.000.000,00							42.000.000,00	
2.18.06.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan data dan informasi Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi				1400 dokumen	1400 dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)			42.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																			
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1300 Dokumen	1300 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Jepara, Jepara, Panggang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)			42.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
J U M L A H									4.742.146.000,00	5.136.299.000,00	5.136.299.000,00	394.153.000,00					2.494.400.200.055,00			

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024, menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil merupakan prioritas utama.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2024 selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan maupun kelompok masyarakat lainnya selain itu juga konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai

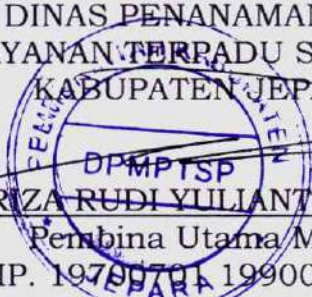
program yang telah dirumuskan dalam Renja maupun pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.

Diharapkan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, yang merupakan salah satu dokumen pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah mampu mengarahkan kebijakan dan program yang pencapaiannya sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dan untuk mewujudkannya diperlukan dukungan dan peran serta/partisipasi masyarakat dari semua stakeholder dan atau semua pihak yang berkepentingan.

Diharapkan hasil pembangunan dapat merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat serta mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah antisipasif dan korektif akan ditempuh di masa akan datang guna perbaikan dan menyiasati tingkat pencapaian yang lebih baik dalam penyusunan perubahan Renja OPD. Penggalangan aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan penyusunan Perubahan Renja OPD akan dilakukan lebih akurat sehingga di tahun anggaran selanjutnya semua program / kegiatan yang direncanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara, dapat terlaksana sesuai rencana, tepat sasaran bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Jepara, 10 Juli 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA

ERIZA RUDI YULIANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19700701199003 1 007